



Nama Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Nama Fakultas : **HUKUM**

Nama Prodi : **MAGISTER ILMU HUKUM**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	KONSENTRASI	SM
HUKUM SUMBER DAYA KELAUTAN	18B01213802	2	HUKUM KEAGRARIAAN	II
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi	
	Tanda Tangan Prof. Dr.Farida Patittingi, SH, M.Hum.		Tanda Tangan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.	

CPL-PRODI KEWAJIBAN MATA KULIAH

S4	Memiliki semangat dan integritas yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai kemaritiman
P1	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik dan sosiologi hukum serta mengelola riset di bidang hukum
KU1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif
KU3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
KK2	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik;
S4	Memiliki semangat dan integritas yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai kemaritiman

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguraikan, membandingkan, dan menyelesaikan masalah pengaturan pemanfaatan, pengelolaan sumber daya kelautan dari perpektif lokal, nasional, dan Internasional.

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH

- Mata Kuliah ini mempelajari tentang Sejarah Pengaturan dan Penguasaan Laut Pengertian dan Ruang Lingkup Perairan menurut UUPA dan Peraturan Perundang-undangan; Konsep Penguasaan Laut menurut: a. Hukum Adat b. Hukum Nasional c. Hukum Internasional; Konsep Pengaturan pengelolaan Sumber Daya di bidang Kelautan; Kelautan secara Terpadu (*Integrated coastal/sea management*); Kewenangan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah di bidang Kelautan; Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi WP3K; Kebijakan Pemanfaatan Sumber daya Kelautan yang Berkelanjutan; Konsep hukum *Aanslibbing* dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil; WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) RI dan Jalur-Jalur Penangkapan Ikan Penempatan Alat Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan; Strategi Penegakan Hukum terhadap *Illegal Fishing, Unreported, dan Unregulated*; Konsep Pengaturan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Laut; Kelembagaan masyarakat (masyarakat tradisional dan masyarakat Hukum Adat), dan pemerintah dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan; Kebijakan Kelautan Indonesia Pasca UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia; dan Isu-isu kontemporer.

BUKU ACUAN:

Adrianto, Luky dan Solihin, Akhmad. 2014. *Review terhadap Revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Conservation International Indonesia. Jakarta.

Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif)*. Genta Publishing. 2012

Apridar, dkk. 2011. *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Boedi Harsono, 2002. *Undang-undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid I Bagian II, Djambatan, Jakarta.

- Cicin Sain and Robert W.Knecht.1998. *Integrated Coastal and Ocean Management Concepts and Practices*. Washington DC. Island Press.
- Dahuri, Rokhmin dkk. 1999. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Edgar Bodenheimer dalam Muhibbin, Nur 'Aini dan Isnaini, 2008. *Budaya Masyarakat Pantai Terhadap Penataan Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Tanah Oloran Di Pesisir Pantai Utara Laut Jawa – Kabupaten Gresik*.
- Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum* (Sebuah Telaan Sosiologis). PT. Suryandaru Utama. Semarang.
- Farida, 2005. *Status Hukum Tanah Pantai dan Pulau-Pulau Kecil serta Implikasinya terhadap Hak-hak Masyarakat Lokal* (Proposal Disertai). Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Farida. 2008. *Penguasaan Tanah Pulau-Pulau Kecil (Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia)*. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Febrian dkk. 2009. *Pembangunan Hukum dan Konflik Undang-Undang bidang Sektoral*. Hasil Penelitian kerjasama Pusat Studi Kebijakan Hubungan Pusat dan Daerah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia. Palembang.
- Hartomo, Wahyu. 2004. *Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir terpadu dalam Menunjang Pembangunan Daerah*. Makalah disampaikan pada Matakuliah Pengantar ke Falsafah Sains. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (Program Doktor).
- Kahar, 2016. *Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*. Disertasi pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Maria S.W. Sumardjono dalam Farida, 2005. *Status Hukum Tanah Pantai dan Pulau-Pulau Kecil serta Implikasinya terhadap Hak-hak Masyarakat Lokal* (Proposal Disertai), Program Doktor Ilmu Hukum PPs Unhas, Makassar.
- Muchsin, M. dan Imam Koeswahjono. 2008. *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan penataan Ruang*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Muhibbin, Nur 'Aini dan Isnaini, 2008. *Budaya Masyarakat Pantai Terhadap Penataan Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Tanah Oloran Di Pesisir Pantai Utara Laut Jawa – Kabupaten Gresik*.
- Nirwan Junus. 2012. *Sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah*. Jurnal INOVASI. Volume 9, Nomor 2, Juni 2012. ISSN 1693-9034.
- Nurjaya, I Nyoman. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Persepektif Antropologi Hukum*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.
- Parthiana, I Wayan. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Penerbit Yrama Widya. Bandung.
- Pattileuw, Alma Manuputty. 2012. *Hak Lintas Damai pada Selat yang Digunakan untuk Pelayaran Internasional (Seri Hukum Laut Internasional)*. Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unhas dan Pustaka Pena Makassar.
- Farida. 2012. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. Republik Institute. Rangkang Education. Yogyakarta.
- _____. 2013. *Penerapan Prinsip Keadilan Sosial (Social Justice) dalam Pengaturan Penguasaan Tanah dan pemilikan Tanah di Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil di Indonesia*. Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2003. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Terjemahan dari Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Cetakan Pertama. Penerbit HuMa, Jakarta.
- Rahardjo, Sigit PD. 2009. *Sinkronisasi Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Bulletin Tata Ruang, Edisi September-Oktober 2009.
- Ridwan, Alimuddin Muhammad. 2004. *Mengapa Kita (Belum) Cinta Laut?*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- Riza M. Damanik. 2009. *Gerak Mundur Kelautan Kita*. Kiara (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan). Jakarta.

- Riza M. Damanik, Suhana, Budiati Prasetiamartati. 2008. *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Kritis di Laut Indonesia)*. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Jakarta.
- Rudyanto, Arifin. 2004. *Kerangka Kerjasama dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut*. Makalah disampaikan pada Sosialisasi Nasional Program MFDCP, 22 September 2004.
- Saad, Sudirman dkk. (editor). 2001. *Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Laut*. Prosiding Lokakarya Regional Pulau Sulawesi. Makassar.
- Saad, Sudirman. 2003. *Politik Hukum Perikanan di Indonesia*. Dian Pratama Printing. Jakarta
- _____, 2009. *Bajo, Berumah di Laut Nusantara*, Coremap II, Jakarta.
- Saleng, Abrar. 2007. *Kaidah Keseimbangan dalam Pengaturan Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Satria, Arif., dkk. 2002. *Menuju Desentralisasi Kelautan*. Penerbit Cidesindo, Pusat kajian Agraria Institut Pertanian Bogor, dan Partnership for Governance Reform in Indonesia. Jakarta.
- Satria, Arif. 2009. *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*. IPB Press. Bogor.
- Sumardjono, Maria, dkk. 2009. *Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumberdaya Alam*. Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Bekerjasama dengan ESP2-Danida. Jakarta.
- Supriharyono. 2007. *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sunyowati, Dina, 2008. Penataan Ruang Laut berdasarkan *Integrated Coastal Management*. *Mimbar Hukum*, Volume 20. Nomor 3. edisi Oktober 2008 (halaman 411-588). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suparno. 2009. *Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil sebagai salah satu dokumen penting untuk disusun oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota*. *Jurnal mangrove dan Pesisir*, Volume IX. Nomor 1. Edisi Februari 2009. ISSN: 1411-0679. Universitas Bung Hatta Padang.

Supriharyono. 2007. *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Tuwo, Ambo. 2011. *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut (Pendekatan Ekologi, Sosial-Ekonomi, Kelembagaan, dan Sarana Wilayah)*. Brillian Internasional. Surabaya.

Wahid, A.M. Yunus. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Kencana Predanamedia Group. Jakarta.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Pertemuan Ke:	Kemampuan akhir yang diharapkan/ Sasaran Pembelajaran	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator/ Kriteria Penilaian	Bobot (%)
I	Mahasiswa mampu menguraikan sejarah pengaturan dan penguasaan Laut, serta ruang lingkup perairan menurut UUPA dan Perundang-undangan lainnya	Pembukaan Matakuliah Materi Pendahuluan a. Sejarah Pengaturan dan Penguasaan Laut b. Pengertian dan Ruang Lingkup Perairan menurut UUPA dan Peraturan Perundang-undangan	Kuliah Interaktif	2x50 menit	- kemampuan mengemukakan pendapat - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam diskusi	3
II	Mahasiswa mampu membandingkan konsep penguasaan menurut Hukum Adat/Hukum Nasional dan Hukum Internasional	Konsep Penguasaan Laut menurut: a. Hukum Adat b. Hukum Nasional c. Hukum Internasional	Diskusi	2x50 menit	- kemampuan mengemukakan pendapat - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam diskusi	3
III	Mahasiswa mampu membandingkan berbagai konsep pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan	Konsep Pengaturan pengelolaan Sumber Daya di bidang Kelautan - UNCLOS - UU Perikanan - UU PWP3K - UU Kelautan - UU Perairan Indonesia - UU Pertambangan - DII.	Kuliah Interaktif	2x50 menit	- kemampuan mengemukakan pendapat - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam diskusi	3

IV	Mahasiswa mampu membedakan konsep-konsep pengelolaan SD Kelautan secara terpadu menurut konsep Hukum Adat, Hukum Nasional, dan Hukum Internasional	Konsep Pengelolaan Sumber daya Kelautan secara Terpadu (<i>Integrated coastal/sea management</i>) - Konsep menurut Hukum Adat - Konsep Hukum Nasional - Konsep Hukum Internasional	Diskusi	2x50 menit	- kemampuan mengemukakan pendapat - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam diskusi	3
V	Mahasiswa mampu membedakan dan mengkritisi kewenangan Pemerintah/ Pemerintah Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan terkait bidang Kelautan	- Kewenangan Pemerintah, dan - Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kelautan	Kuliah Interaktif	2x50 menit	- kemampuan mengemukakan pendapat - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam diskusi	3
VI	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan pengaturan Penataan Ruang Laut dan RZWP3K terkait dengan SD Kelautan	- Penataan Ruang Laut dan - Rencana Zonasi WP3K	Diskusi	2x50 menit	- kemampuan mengemukakan pendapat - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam diskusi	3
VII	Mahasiswa mampu menguraikan kebijakan pemanfaatan SD Kelautan yang berkelanjutan	Kebijakan Pemanfaatan Sumber daya Kelautan yang Berkelanjutan	Kuliah Interaktif	2x50 menit	- kemampuan mengemukakan pendapat - pengembangan gagasan - keaktifan dalam diskusi	3

VIII		MID TEST	Ujian Tulis		Kemampuan mahasiswa dalam menjawab Soal dan Kejujuran	15
IX	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep reklamasi yang berlangsung secara alamiah (<i>aanslibbing</i>) menurut Hukum Adat dan Reklamasi menurut peraturan perundang-undangan.	Konsep hukum <i>Aanslibbing</i> dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Kuliah Interaktif	2x50 menit	- kemampuan mengemukakan pendapat - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam diskusi	3
X	Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan konsep pengaturan penangkapan ikan menurut berdasarkan WPP dan Jalur-Jalur Penangkapan Ikan	<ul style="list-style-type: none"> • WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) RI • Jalur-Jalur Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan 	Diskusi	2x50 menit	- kemampuan mengemukakan pendapat - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam diskusi	4
XI	Mahasiswa mampu membedakan strategi (tugas dan fungsi) aparat penegak hukum dan regulator dalam penanganan <i>illegal fishing</i> , <i>unreported</i> , dan <i>unregulated</i>	Strategi Penegakan Hukum terhadap <i>Illegal Fishing</i> , <i>Unreported</i> , dan <i>Unregulated</i>	Kuliah Interaktif	2x50 menit	- kemampuan mengemukakan pendapat - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam diskusi	4

XII	Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan konsep-konsep pengaturan Kawasan Konservasi di wilayah laut.	Konsep Pengaturan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Laut	Diskusi	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - kemampuan mengemukakan pendapat - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam diskusi 	
XIII	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan kelembagaan masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan SD kelautan.	Kelembagaan masyarakat (masyarakat tradisional dan masyarakat Hukum Adat, dan pemerintah dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan	Kuliah Interaktif	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - kemampuan mengemukakan pendapat - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam diskusi 	4
XIV	Mahasiswa mampu mengkaji dan mengkritisi konsep kebijakan kelautan menurut UU No. 32 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya.	Kebijakan Kelautan Indonesia Pasca UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia	Kuliah Interaktif	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - kemampuan mengemukakan pendapat - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam diskusi 	4
XV	Mahasiswa mampu mempresentasikan dan mendiskusikan isu-isu SD Kelautan yang kontemporer	Isu-isu kontemporer (1)	Presentasi Makalah	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - kemampuan mengemukakan pendapat dengan rujukan sumber yang jelas - kualitas makalah 	10

XVI	Mahasiswa mampu mempresentasikan dan mendiskusikan isu-isu SD Kelautan yang kontemporer	Isu-isu kontemporer (2)	Presentasi Makalah	2x50 menit	- kemampuan mengemukakan pendapat dengan rujukan sumber yang jelas - kualitas makalah	10
	UJIAN AKHIR (FINAL)				-	25